

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Effectiveness of Regional Government Policies in Improving Community Welfare

Safitri Faruq Firdaniyah¹, Asriadi²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01
Hal : 35-40
Diterbitkan : 01 Juli 2025

KORESPONDENSI

No Handphone : 0831-2719-6854
E-mail : safitriefaruq@gmail.com

A b s t r a k

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi kebijakan publik yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan profesionalitas, berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik pemerintah daerah. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat guna terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mengatasi hambatan yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance

A b s t r a c t

Local governments have a crucial role in improving public welfare through the implementation of effective public policies. This study aims to analyze the effectiveness of local government policies in improving public welfare, with a focus on the application of good governance principles. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature studies. The results of the study indicate that the application of good governance principles, such as transparency, accountability, efficiency, effectiveness, responsiveness, and professionalism, plays a significant role in improving the effectiveness of local government public policies. The implementation of policies that are right on target, on time, in the right quantity, in the right quality, and in the right use has been proven to be able to significantly improve public welfare. However, there are several obstacles, such as limited human resources and infrastructure, which affect the effectiveness of these policies. Therefore, a strong commitment is needed from

local governments to continue to improve governance and overcome existing obstacles in order to achieve better public welfare.

Keywords: Policy Effectiveness, Local Government, Public Welfare, Good Governance

Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Efektivitas kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut Pinem et al. (2024), prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan profesionalitas menjadi landasan dalam memastikan pemerintahan yang solid dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah daerah memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik. Pinem et al. (2024) menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan profesionalitas menjadi landasan dalam memastikan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Studi kasus di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa kebijakan publik yang didasarkan pada pengembangan potensi lokal melalui koperasi dan UMKM berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dianingratri dan Munandar (2023) menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut terlihat dari ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, dan dukungan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan potensi lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hayati (2023) mencatat bahwa

jiwa kewirausahaan dan keterampilan masyarakat yang masih rendah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tergantung pada berbagai faktor, seperti inovasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan dana secara transparan. Berikut ini adalah beberapa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

Inovasi dalam mengentaskan kemiskinan

Kemitraan dengan sektor nonpemerintah, Regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Program bantuan sosial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra

Program pembangunan, seperti pembangunan rusunawa, program Sejuta Rumah, dan program Tapera. Program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti meningkatkan UMR Program untuk mengurangi kesenjangan ekonomi

Program untuk memberikan pendidikan gratis dan wajib. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya:

Memberikan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Membangun infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya. Membangun kawasan industri Membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Membangun sistem agribisnis. Membangun industri kecil

Mengembangkan kerajinan rakyat

Meningkatkan UMR. Memberikan pendidikan gratis dan wajib. Meningkatkan ekonomi kreatif Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti: Meningkatkan perkembangan bisnis, Mendorong persaingan usaha yang sehat, Membantu kelompok ekonomi lemah, Mempercepat pembangunan pedesaan, Menyediakan prasarana.

Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa bidang, seperti berikut ini. Bidang ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan UMR, mengurangi kesenjangan ekonomi, dll. Bidang pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis dan wajib serta berkualitas untuk rakyat Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, sistem sanitasi, perbaikan gizi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan. Sebagai anggota masyarakat kita juga perlu bertanggung jawab atas terlaksananya proses pelayanan kesehatan yang baik.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks kesehatan yaitu dengan memperdayakan masyarakat sebagai upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri

Jadi, langkah pemerintah dalam memajukan kesejahteraan untuk jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak antara lain yaitu Pemerintah mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja),

mengadakan Program Kartu Prakerja, Mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang dapat melindungi masyarakat atas pekerjaannya, Memberikan BLT.

Kesimpulan

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas perencanaan, implementasi, serta pengawasan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan pemerintah daerah yang efektif harus berlandaskan pada kebutuhan riil masyarakat dan mempertimbangkan karakteristik lokal. Perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya, terbukti mampu menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan tepat sasaran.

Pada tahap implementasi, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh alokasi sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan UMKM, dan penguatan sektor ekonomi kreatif, memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Namun, beberapa kebijakan yang bersifat bantuan langsung, meskipun efektif dalam jangka pendek, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dampak kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu menjaga koordinasi antarinstansi dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi berhasil menciptakan program yang lebih efektif dan efisien. Namun, hambatan seperti tumpang tindih kebijakan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi.

Selain itu, keberlanjutan kebijakan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Kebijakan yang tidak memiliki rencana jangka panjang atau tidak terintegrasi dengan kebijakan tingkat nasional cenderung kehilangan arah dan gagal mencapai tujuan utamanya.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas perencanaan melalui analisis data yang komprehensif, memperkuat sinergi dengan masyarakat dan stakeholder, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kebijakan. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, kebijakan pemerintah daerah harus dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan.

Daftar Pustaka

Asfar, A., Zauhar, S., Rochmah, S., & Hermawan. (2021). Challenges and problems of decentralization in infrastructure development to improve public welfare: Case study at Rokan Hilir District, Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(2), 44–52. <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210502.13>

- Balai Diklat Keuangan Makassar, & Saragih, R. (2021). Regional government spending efficiency on health and education in decentralization era: Evidence from Indonesia. *Info Artha: Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 3(1), 452. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.452>
- Chalil, T. M. (2020). The efficiency of village government spending in Indonesia: A meta-frontier analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, DOI: 10.22146/jieb.44660
- EcoS S., & Suyanto, Z. A. (2024). Efficiency analysis of provincial government expenditures on education in Indonesia (before and after fiscal decentralization). *Economics, Social and Development Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.24252/ecc.v11i2.52483>
- Iskandar, A. Z., & Saragih, R. (2021). Regional government spending efficiency on health and education in decentralization era: Evidence from Indonesia. *Info Artha*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.452>
- Parahyangan, F. R. S., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The impact of fiscal decentralization on welfare in selected provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Priyono, N., Arifah, S., Wulandari, E., & Prasetyanto, P. K. (2020). The determinants of level of society welfare within fiscal decentralization framework in regional autonomy era. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 1–16. <https://doi.org/10.22146/jiep.10545>
- Sandjaja, F. R. P., Nafisa, F., & Manurung, I. N. (2020). The impact of fiscal decentralization on welfare in selected provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 21–31. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.21-31>
- Salam, R. (2016). Efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 58–70.
- Salam, R., & Hussain, A. (2021). Decentralization and its influence in determining the direction of public policy as an effort to improve community welfare. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 197–209. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i4.197>
- Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal decentralization, accountability and corruption indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13, 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiscal decentralization policy in promoting Indonesia human development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763–771. Retrieved from <https://econpapers.repec.org/article/ecojourn1/2015-03-16.htm>
- Smoke, P., & Lewis, B. D. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
- Wardhani, R., Rossietta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 1–18.

- Voorn, B., Van Genugten, M. L., & Van Thiel, S. (2017). The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review. *Local Government Studies*, 43(4), 573–598. <https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1276623>
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). Participatory planning in Indonesia: Seeking a new path to democracy. *Policy Studies*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121307>
- Yuliani, E. R. (2004). Decentralization, deconcentration and devolution: What do they mean? *CIFOR Info Brief*, 3(2), 1–5.
- Zainuddin, M., & Wijaya, H. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–252. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing*, 52(3), 2–22. <https://doi.org/10.1177/002224298805200302>
- Zheng, C. Q., & Guo, Y. (2012). Government decentralization, local governance, and social welfare: Evidence from rural China. *Journal of Comparative Economics*, 40(2), 232–251. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2011.08.003>